

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis, deskripsi, serta penjabaran pada bagian hasil dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 1 Krian, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Proses *collaborative governance* pada penerapan SRA di SMP Negeri 1 Krian telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya ideal sebagaimana model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008). Kolaborasi antara DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, SMP Negeri 1 Krian, dan PT Karya Bintang Mandiri berlangsung karena adanya kebutuhan bersama untuk memenuhi standar SRA. Proses ini berjalan dengan baik tetapi masih menunjukkan beberapa hambatan dalam berjalannya komunikasi, terutama pada aspek pelaporan bantuan CSR dari pihak dunia usaha kepada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.
- 5.1.2 Kedua, kondisi awal kolaborasi ditandai oleh adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan serta kapasitas antar aktor. SMPN 1 Krian sebagai aktor utama berada pada posisi ketergantungan terhadap DP3AKB untuk pendampingan teknis dan terhadap dunia usaha (PT Karya Bintang Mandiri) dalam penyediaan sarana-prasarana. Ketidakseimbangan ini wajar

dalam konteks pendidikan, tetapi berdampak pada tingginya beban peran sekolah sebagai pelaksana harian SRA. Dari sisi motivasi, seluruh aktor memiliki dorongan yang kuat dilihat dari DP3AKB yang berorientasi pada target penjangkauan perlindungan anak, SMPN 1 Krian berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan SRA, dan PT Karya Bintang Mandiri memanfaatkan kolaborasi sebagai bagian dari pemenuhan CSR.

5.1.3 Ketiga, desain kelembagaan sudah tersedia tetapi masih belum lengkap untuk mendukung kolaborasi jangka panjang. Regulasi formal mengenai SRA memberikan pedoman umum mengenai peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan dunia usaha. Namun, belum terdapat mekanisme baku mengenai prosedur pelaporan dukungan CSR ke pemerintah daerah, sehingga DP3AKB kesulitan melakukan pemetaan kontribusi dunia usaha. Ketidakjelasan desain organisasi kolaborasi ini membuka ruang bagi ketidakteraturan dan potensi miskomunikasi yang menghambat efektivitas tata kelola kolaboratif.

5.1.4 Keempat, proses kolaboratif sudah berjalan melalui komunikasi rutin, pendampingan, dan penyediaan fasilitas, hanya saja belum mencapai kedalaman kolaborasi yang kuat. *Small wins* sudah terlihat, misalnya peningkatan fasilitas ramah anak, adanya bimbingan teknis, serta pelaksanaan sosialisasi yang memperkuat kepercayaan antar aktor. Namun, pembangunan kepercayaan belum sepenuhnya merata. Kurangnya transparansi perusahaan kepada DP3AKB menyebabkan adanya

kesenjangan kepercayaan yang bisa menghambat proses evaluasi secara keseluruhan.

- 5.1.5 Kelima, output kolaborasi menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Krian telah mencapai tahap “MAMPU”. Sekolah telah memenuhi sebagian besar komponen SRA, tetapi masih memiliki kekurangan pada aspek sarana dan prasarana yang membutuhkan dukungan lebih besar dari aktor lain. Keberhasilan mencapai tahap MAMPU menunjukkan bahwa *collaborative governance* berjalan efektif pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* di SMP Negeri 1 Krian menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih membutuhkan penguatan struktur kelembagaan dan transparansi agar mencapai tahap kolaborasi yang ideal sesuai dengan model *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi DP3AKB Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis di lapangan, terdapat 3 saran yang dapat penulis sampaikan. Pertama, membangun mekanisme pelaporan CSR yang terstandarisasi dan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan seluruh dukungan yang diberikan ke lingkungan sekitarnya. Hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, pemetaan kebutuhan, serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Kedua, meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring terutama pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi komponen SRA, sehingga kolaborasi

tidak hanya berfokus pada sisi administratif tetapi juga pada penguatan kapasitas sekolah. Ketiga, menyusun forum komunikasi multi-aktor yang formal, misalnya *Sidoarjo Child-Friendly Forum*, agar kolaborasi berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

5.2.2 Bagi PT Karya Bintang Mandiri dan Dunia Usaha

Terdapat dua saran yang dapat penulis sampaikan untuk PT Karya Bintang Mandiri dan Dunia Usaha lainnya. Pertama, meningkatkan transparansi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sebelum, selama/, dan setelah memberikan bantuan CSR. Tanpa koordinasi, dampak CSR menjadi kurang lengkap dan sulit dievaluasi. Kedua, menyusun program CSR yang sejalan dengan indikator SRA, sehingga kontribusi perusahaan benar-benar selaras dengan kebutuhan sekolah, bukan sebatas aktivitas CSR simbolik.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk peneliti selanjutnya adalah pertama, dapat memperluas lokus ke lebih banyak sekolah agar diperoleh gambaran mengenai variasi tingkat keberhasilan kolaborasi di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, perlu dilakukan kajian kuantitatif mengenai efektivitas kolaborasi dan kontribusi masing-masing aktor secara terukur. Ketiga, eksplorasi lebih jauh mengenai peran orang tua dan komunitas sebagai aktor non-pemerintah yang sering kali kurang dilibatkan dalam penelitian SRA.